



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS YULIANTO
2. Jabatan : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG
SIDEMPUAN
3. NHK : 974481

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/135 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , Rp. 1.100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1.300 m2/72 m2 di KAB / KOTA
KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 81.100.000

1. MOTOR, SUZUKI SHOGUN Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp.
100.000
2. MOBIL, DAIHATSU XENIA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
60.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
7.500.000
4. MOTOR, HONDA MCB WIN (BEKAS) Tahun 2003, HASIL
SENDIRI Rp. 8.500.000
5. MOTOR, HONDA MEGA PRO (BEKAS) Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 19.000.000

D. SURAT BERTAHAP Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 29.766.144

F. HARTA LAINNYA Rp. ----



Sub Total	Rp.	2.329.866.144
III. HUTANG	Rp.	860.000.010
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.469.866.134

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.